

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, R. A., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (pad) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. *eProceedings of Management*, 8(2).
- Agustini, S *et al.* (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Ajija, S., Dyah, W., Setianto, Rahmat, H., dan Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai E-Views*. Jakrta: Salemba Empat.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105-113.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39.
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika. *Jurnal Akuntansi* 1(2).
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 11(1), 68-79.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013–2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 35-49.
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390.
- Atmasasmita, R *et al.* (2019). *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi Fakta dan Analisis*. Jakarta: KENCANA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2016*. <https://jabar.bps.go.id>
- Balqis, M., Murdiati, S., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (Dppkad) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(2).
- Basuki, A T dan Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta,Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bratakusumah, D. S., dan Solihin, D. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Anggoro, D. D. (2017) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi I. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–63.
- Davey, K.J. (1988). *Financing Regional Government: International Practice and Their Relevance to the Third World*. Institute of Local Government Studies, University of Birmingham
- Davis, J. H., Schoorman, F. Davi., dan Donaldson, Lex. 1997. Torward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 221, 20-47.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38-47.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Data Series: Keuangan Daerah Setelah Tahun Anggaran 2006*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144-3159.

- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial Independence of Regencies and Cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets* 9(2), 199.
- Fahlevi, H *et al.* (2021). *Dinamika Akuntansi Di Masa Krisis Volume 1: Perkembangan Kontemporer Akuntansi di Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127.
- Haerunnisa. (2018) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar”. *Jurnal Akuntansi*. 4 (2), hlm 44-55
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Handayani, T. U., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348-2361.
- Hantono. (2020). *Metodologi Penelitian Skripsi dengan Aplikasi SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harnovinsah *et al.* (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Unitomo Press.
- Hernandez, M. 2008. Promoting Stewardship Behavior in Organizations: A Leadership Model. *Journal of Business Ethics*, (80) 1, 121-128
- Huda, M. K. (2018). *Hukum Pajak Kontemporer-Teori, Praktik dan Perkembangan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

- Kamaroellah, A. (2020). *Akuntansi Manajemen Pendidikan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Kawatu, S. F. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish
- Kristina, *et al* (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Edisi 3. Penerbit Erlangga
- Machfud *et al* (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14-31.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- (2022). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi XX. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 110-118.
- Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. S. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20-36
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nggilu, *et al* (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).

- Nordiawan, D *et al.* 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2012). *Anggaran Disuatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174-186.
- Oktaviani, W., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2017). Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 105-112.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- Prasetyawan, A., & Gamaputra, G. (2022). *Administrasi Pemerintah Daerah*, Klaten: Lakeisha.
- Purnomo *et al.* (2022). *Penggalian dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 224-234.
- Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Edisi I. Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111-134.

- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 51-64).
- Sebastiana,V dan Cahyo, H. (2016). Analysis of Economi Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 5 (2): 272-285.
- Siagian, A. R., & Kurnia, K. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *eProceedings of Management*, 9(5).
- Siahaan, M.P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swarjana, I Ketut. (2022). *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 15 September 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).

- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99-109.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi*. Jakarta: Ekonisia
- Widjaja, H. A. W. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wildan , M (2019, Juli 19). *Perencanaan Anggaran Pemda Dinilai Belum Ideal*. Ekonomi Bisnis.com Diakses pada 14 Desember 2022 dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190719/9/1126450/perencanaan-anggaran-pemda-dinilai-belum-ideal>
- Wulandari, P. A., dan Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.